

FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1994 - 2010

Hera Pradipta Putri, Dwisetia Poerwono¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This studi aimed to determine internal and external factors that influence Gross Domestic Product (GDP) of Centra Java Province from 1994 to 2010. The purpose of thus study is based on the problem of low Gross Domestic Product (GDP) of Central Java Province. Gross Domestic Product (GDP) an area influenced by internal and external factors, as well as to GDP of Central Java Province which is also influenced by internal and external factors. Internal factors are factors that originate from within the region itself, whereas external factors are factors that originate from outside the region. In this study are included in the internal factors are local government spending, private investments, and prices of domestic goods in Central Java Province, while belonging to the external factors are GDP of West Java Province and East Java Province.

The data used in this study is secondary data. Data taken at government agencies. Analysis method that is used is OLS method were analyzed using analysis tools evIEWS 6. The dependent variable in this study is GDP of Central Java Province, and the independent variables in this study are GDP of West Java Province, GDP of East Java Province, local government spending of Central Java Province, private investments in Central Java Province, and prices of domestic goods in Central Java Province.

The Results of this study show that internal and external factors alike – each has and influence on GDP of Central Java Province. External factor have more influence on GDP of Central Java Province than internal factor. Independent variable that have a significant impact on GDP of Central Java Province are GDP of West Java Province and GDP of East Java Province.

Keywords: GDP, internal-factor, external-factor, OLS.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Artinya pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh (Sibero, 1985). Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Artinya, Jawa Tengah berperan dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dihitung melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Dilihat dari satu region provinsi, Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan memiliki PDRB yang baik, karena selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan. Namun ketika dibandingkan ke dalam satu region yang lebih besar, yaitu Pulau Jawa, dimana Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya, pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah yang memiliki pertumbuhan PDRB terendah kedua setelah pertumbuhan PDRB D.I. Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

¹ Penulis Penanggung Jawab

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 menurut Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2001 – 2010 (dalam %)

Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata - Rata
Banten	3.64	4.11	5.07	5.63	5.88	5.57	6.04	5.77	4.69	5.94	5.23
Jawa Barat	3.89	3.94	4.84	4.77	5.6	6.02	6.48	6.21	4.19	6.09	5.20
DKI Jakarta	4.72	4.89	5.31	5.65	6.01	5.95	6.44	6.23	5.02	6.51	5.67
Jawa Tengah	3.40	3.55	4.98	5.13	5.35	5.33	5.59	5.61	5.14	5.84	4,99
DI.											
Yogyakarta	4.27	4.5	4.58	5.12	4.73	3.69	4.31	5.03	4.43	4.88	4.55
Jawa Timur	3.76	3.8	4.78	5.83	5.84	5.8	6.11	6.16	5.01	6.68	5.38

Sumber: BPS yang telah diolah.

Rendahnya PDRB Provinsi Jawa Tengah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari daerah itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari daerah lain (faktor eksternal). Hal ini berkaitan dengan pendapat para ahli ekonomi regional yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi regional terjadi sebagai akibat dari penentu – penentu internal dan penentu – penentu eksternal. Penentu internal adalah faktor – faktor yang berasal dari dalam daerah, sedangkan penentu eksternal adalah faktor yang berasal dari luar daerah, salah satunya adalah tingkat permintaan dari daerah – daerah lain terhadap barang – barang dan jasa – jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah tertentu. Faktor internal yang dimaksud disini adalah faktor potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah adanya keterkaitan kegiatan ekonomi (*linkage*) antardaerah sekitarnya, khususnya daerah yang berbatasan langsung dengan daerah tersebut dan memiliki karakteristik wilayah yang hampir sama. Di dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam faktor internal adalah pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah, investasi swasta dan pengaruh tingkat harga komoditi di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDRB Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994 – 2010. Tujuan penelitian ini didasari oleh masalah rendahnya PDRB Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Model Pertumbuhan interregional adalah model pertumbuhan yang membahas keterkaitan ekonomi antardaerah. Model ini berlandaskan pada teori *economic base multiplier*. Jika seluruh komponen pengeluaran agregat di dalam teori *economic base multiplier* dianggap otonomus, maka komponen pengeluaran agregat di dalam model pertumbuhan interregional justru memasukkan faktor – faktor yang berasal dari daerah lain, yaitu melalui penderivasian pada komponen konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor, sedangkan komponen investasi dan pengeluaran pemerintah dianggap tetap otonomus. Dengan kata lain, model pertumbuhan interregional merupakan penderivasian dari teori Keynes yang mana memasukkan unsur interregional pada beberapa komponen pengeluaran agregatnya, dan pada akhirnya model pertumbuhan interregional menghasilkan multiplier regional.

Provinsi Jawa Tengah memiliki PDRB yang rendah dan merupakan daerah yang memiliki PDRB yang paling rendah dibanding dengan dua provinsi di sekitarnya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Rendahnya PDRB Jawa Tengah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari daerah lain, khususnya dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada model pertumbuhan interregional, maka hipotesis di dalam penelitian ini adalah Faktor Internal (Investasi swasta di Provinsi Jawa Tengah, Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Harga Komoditi di Provinsi Jawa Tengah) dan Faktor Eksternal (PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDRB Provinsi Jawa Timur) diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Dependen pada penelitian ini adalah PDRB Provinsi Jawa Tengah. Variabel PDRB Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000. Satuan yang digunakan adalah juta Rupiah. PDRB Jawa Tengah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah PDRB dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2010. Data

Variabel Independen pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu variabel independen yang masuk dalam kategori faktor internal dan variabel independen yang masuk dalam kategori faktor eksternal.

Variabel Independen yang termasuk dalam Faktor Internal

1) Variabel Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Y_{JE})

Data yang digunakan untuk variabel pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah data realisasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut jenis pengeluaran dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2010. Data tersebut terdapat di dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah yang bersumber pada Statistika Keuangan Pemerintah Provinsi dari berbagai tahun yang diterbitkan oleh BPS. Satuan yang digunakan variabel ini adalah juta Rupiah.

2) Variabel Investasi Swasta di Provinsi Jawa Tengah (I_{JE})

Data yang digunakan untuk variabel ini adalah data realisasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1994 – 2010. Sumber data ini berasal dari Jawa Tengah Dalam Angka berbagai tahun. Satuan yang digunakan adalah juta Rupiah.

3) Variabel Tingkat Harga Komoditi di Provinsi Jawa Tengah (IHK_{JE})

Data yang digunakan untuk variabel ini adalah data IHK Kota Semarang untuk tahun 1994 – 1997, sedangkan untuk tahun 1998 – 2010 menggunakan data rata – rata IHK di empat kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purwokerto, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Tegal. Data tersebut bersumber dari Statistika Ekonomi Keuangan Daerah – Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Satuan yang digunakan adalah persen (%).

Variabel Independen yang termasuk dalam Faktor Eksternal

4) Variabel PDRB Provinsi Jawa Barat (Y_{JA})

Variabel ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000. Satuan yang digunakan dalam variabel ini adalah juta Rupiah. PDRB Jawa Barat yang digunakan di dalam penelitian ini adalah PDRB dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2010 yang bersumber dari Statistik Indonesia terbitan BPS dari berbagai tahun.

5) Variabel PDRB Provinsi Jawa Timur (Y_{JT})

Variabel PDRB Provinsi Jawa Timur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000. Satuan yang digunakan dalam variabel ini adalah juta Rupiah. Variabel ini menggunakan data PDRB dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2010. Sumber data berasal dari Statistik Indonesia terbitan BPS dari berbagai tahun.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan runtut waktu tahunan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah melalui studi pustaka.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan alat analisis Eviews 6.

Estimasi Model

Model logaritma digunakan di dalam penelitian ini dengan alasan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Model logaritma bertujuan untuk melihat elastisitas masing – masing variabel. Variabel yang diubah menjadi model logaritma adalah PDRB Provinsi Jawa Tengah (Y_{JE}), PDRB Provinsi Jawa Barat (Y_{JA}), PDRB Provinsi Jawa Timur (Y_{JI}), pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (G_{JE}), dan investasi swasta di Provinsi Jawa Tengah (I_{JE}). Variabel tingkat harga komoditi domestik (IHK_{JE}) tidak diubah ke dalam bentuk logaritma karena satuan yang digunakan dalam variabel harga komoditi sudah dalam bentuk persen. Persen merupakan satuan yang menunjukkan elastisitas suatu variabel.

Perumusan model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LOG}(Y_{JE}) = \beta_0 + \beta_1 \text{LOG}(Y_{JA}) + \beta_2 \text{LOG}(Y_{JI}) + \beta_3 \text{LOG}(G_{JE}) + \beta_4 \text{LOG}(I_{JE}) + \beta_5 \text{IHK}_{JE} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$\text{LOG}(Y_{JE})$ = Logaritma PDRB Provinsi Jawa Tengah.

$\text{LOG}(Y_{JA})$ = Logaritma PDRB Provinsi Jawa Barat.

$\text{LOG}(Y_{JI})$ = Logaritma PDRB Provinsi Jawa Timur.

$\text{LOG}(G_{JE})$ = Logaritma pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

$\text{LOG}(I_{JE})$ = Logaritma investasi swasta di Provinsi Jawa Tengah

IHK_{JE} = Tingkat Harga komoditi domestik Provinsi (IHK) Jawa Tengah

ε_i = Kesalahan pengganggu (*error term*).

β_0 = Konstantan, sedangkan $\beta_1 \dots \beta_5$ = Koefisien estimasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil estimasi persamaan linear berganda:

$$\text{LOG}(Y_{JE}) = -2,706540 - 0,371375 \text{LOG}(Y_{JA}) + 0,1506276 \text{LOG}(Y_{JI})$$

SE (1,927536) (0,168696) (0,224160)

t-Hitung (-1,404145) (-2,201439) (6,719648)

$$-0,034283 \text{LOG}(G_{JE}) - 0,003228 \text{LOG}(I_{JE}) + 0,000282 \text{IHK}_{JE}$$

(0,031474) (0,012544) (0,000202)

(-1,089223) (-0,257358) (1,396255)

R^2 = 0,987791

DW Test = 1,350139

F Hitung = 177,9903

SE = *standart error*

Pembahasan

1) Nilai konstanta sebesar -2,71.

Tanda negative pada koefisien nilai konstanta menunjukkan hubungan yang tidak searah atau berbanding terbalik. Artinya, PDRB Provinsi Jawa Tengah akan menurun sebesar 2,71% jika variabel – variabel independen (PDRB Provinsi Jawa Barat, PDRB Provinsi Jawa Timur, pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, investasi swasta dan indeks harga konsumen di Provinsi Jawa Tengah) bernilai 0 atau dianggap konstan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu memperkuat kondisi dari faktor internal ekonomi melalui peningkatan APBD, yang nantinya dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang kedepannya bertujuan untuk pembangunan modal baik secara fisik maupun non fisik guna

meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Selain memperkuat kondisi internal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan tingkat harga komoditi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memperhatikan faktor eksternal, yaitu keterkaitan kegiatan ekonomi dengan daerah sekitar Provinsi Jawa Tengah melalui perdagangan ataupun investasi swasta.

- 2) Koefisien dari variabel PDRB Provinsi Jawa Barat (Yja) adalah -0,37 dan nilai tersebut bertanda negatif. Artinya, hubungan antara PDRB Provinsi Jawa Barat dan PDRB Provinsi Jawa Tengah tidak searah atau berbanding terbalik.

Untuk mengintepretasikan suatu hasil, tidaklah hanya melihat dari satu hasil saja. Selain dari nilai koefisien, hasil pengujian statistik parameter individual (uji t) juga perlu diperhatikan dalam mengintepretasikan hasil penelitian. Hasil perhitungan Uji t, variabel PDRB Provinsi Jawa Barat (YJA) menunjukkan hasil yang signifikan.

Berdasarkan nilai koefisien dan hasil perhitungan Uji-t dapat diartikan bahwa PDRB Provinsi Jawa Barat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel PDRB Provinsi Jawa Tengah (YJE), namun jika nilai probabilitas variabel PDRB Provinsi Jawa Barat kurang dari nilai signifikansi 10% (0,10), dimana nilai probabilitas variabel PDRB Provinsi Jawa Barat adalah 0,0500, maka kenaikan 1% PDRB Provinsi Jawa Barat tidak dapat meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37% atau kenaikan PDRB Provinsi Jawa Tengah akan berkurang 0,37% jika PDRB Provinsi Jawa Barat meningkat 1%.

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya memang PDRB Provinsi Jawa Barat berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, namun hubungannya berbanding terbalik. Ketika PDRB Provinsi Jawa Barat meningkat, PDRB Provinsi Jawa Tengah justru menurun, atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sama, yaitu struktur ekonomi sekunder (sektor industri pengolahan). Dengan kondisi struktur ekonomi yang sama, maka kedua provinsi ini lebih cenderung bersifat rivalry dalam memproduksi barang dan jasa dan atau menciptakan permintaan dan penawaran yang sama – sama bertujuan untuk meningkatkan PDRB-nya.

- 3) Koefisien dari variabel PDRB Provinsi Jawa Timur (Yji) sebesar 1,51 dan bertanda positif. Hal ini berarti, peningkatan PDRB Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah secara signifikan. Jika PDRB Provinsi Jawa Timur naik sebesar 1%, maka PDRB Provinsi Jawa Tengah akan naik juga menjadi 1,51%. Pengaruh PDRB Provinsi Jawa Timur terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah dapat terjadi melalui mekanisme interaksi perdagangan antarwilayah. Hal ini disebabkan karena terjadi interaksi ekonomi yang bersifat komplementer.

Struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah struktur sekunder, sedangkan struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah struktur tersier. Interaksi antarwilayah di kedua provinsi tersebut bersifat komplementer atau saling melengkapi, sehingga PDRB Provinsi Jawa Timur berpengaruh kuat dan searah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Ketika PDRB Provinsi Jawa Timur Naik, PDRB Provinsi Jawa Tengah juga meningkat, karena adanya interaksi yang searah.

- 4) PDRB Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah dibanding dengan pengaruh PDRB Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa perbedaan pengaruh PDRB Provinsi Jawa Timur dan PDRB Provinsi Jawa Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi ketiga wilayah tersebut. Struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sama, yaitu struktur ekonomi sekunder (sektor industri pengolahan), sedangkan struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah berbeda, yaitu struktur ekonomi tersier (Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran) untuk Jawa Timur dan struktur ekonomi sekunder untuk Jawa Tengah. Perbedaan struktur ekonomi dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah tersebut mendorong kedua provinsi tersebut untuk memerlukan saling keterkaitan kegiatan ekonomi yang bersifat komplementer guna menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaruh PDRB Provinsi Jawa Timur lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh PDRB Provinsi Jawa Barat terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suparta, daerah yang memiliki ruang secara geografis berdekatan dan memiliki struktur ekonomi, potensi ekonomi serta sumber daya yang berbeda sangat memerlukan terjadinya saling keterkaitan kegiatan ekonomi untuk menjaga

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Di dalam penelitian I Wayan Suparta, perekonomian Provinsi DKI Jakarta dan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan sama – sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Meskipun demikian, pengaruh perekonomian Provinsi DKI Jakarta lebih kuat dibanding pengaruh perekonomian Provinsi Sumatera Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Dilihat dari struktur ekonominya, ketiga provinsi tersebut memiliki struktur ekonomi yang berbeda, walaupun secara geografis daerah ketiga provinsi tersebut berdekatan. Struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta adalah struktur ekonomi tersier, Provinsi Sumatera Selatan berstruktur ekonomi sekunder dan Provinsi Lampung berstruktur ekonomi primer. Ketiga provinsi tersebut memiliki struktur ekonomi dan potensi ekonomi yang berbeda, sehingga sifat komplementer di dalam interaksi kegiatan ekonominya kuat, oleh karena itu perekonomian Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan sama-sama memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

- 5) Koefisien variabel pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Gje) adalah -0,034 dan bertanda negatif. Hal ini berarti hubungan variabel pengeluaran Pemerintah tidak searah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Jika pengeluaran pemerintah naik 1% maka PDRB akan turun sebesar 0,034%.

Menurut perhitungan Uji-t, variabel Pengeluaran Pemerintah (GJE) tidak berpengaruh signifikan, karena nilai probabilitasnya lebih dari nilai signifikansi 10% (0,10), yaitu sebesar 0,8017.

PDRB Provinsi Jawa Tengah menurun ketika pengeluaran pemerintah naik. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya disebabkan oleh besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pengeluaran rutin lebih besar dari pada pengeluaran untuk pengeluaran pemerintah.

Pengertian Pengeluaran Rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas – tugas umum pemerintah dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga. Berdasarkan pengertian pengeluaran rutin dan jenis – jenisnya, dapat dikatakan bahwa sifat pengeluaran rutin adalah belanja atau pengeluaran administrasi. Hal ini disebabkan karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk tugas umum dan pembayaran kewajiban atas hutang, tidak memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi secara riil.

Lain halnya dengan pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi secara riil. Pengertian pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek – proyek pembangunan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pembangunan memiliki sifat pengeluaran modal untuk pembangunan ekonomi secara riil.

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih besar pada pengeluaran rutin daripada pengeluaran pembangunan. Besar pengeluaran rutin 60,34% dari total pengeluaran pemerintah, sedangkan jumlah pengeluaran pembangunan hanya sebesar 39,66% dari total pengeluaran pemerintah. Jika pengeluaran rutin di Provinsi Jawa Tengah meningkat terus tanpa diimbangi dengan peningkatan pengeluaran pembangunan, maka beban pemerintah lebih besar, sehingga PDRB Provinsi Jawa Tengah akan menurun. Hal ini disebabkan karena beban administrasinya lebih besar dari pada beban modal untuk pembangunan ekonomi di sektor riil. Oleh karena itu, PDRB Provinsi Jawa Tengah akan menurun ketika pengeluaran pemerintah meningkat.

- 6) Koefisien variabel investasi swasta yang berada di Provinsi Jawa Tengah (Ije) sebesar -0,003 dan bernilai negative. Berdasarkan hasil dari persamaan model regresi variabel investasi swasta yang berada di Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan yang tidak searah dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan statistik parameter individual, variabel investasi swasta yang berada di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan beberapa teori pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB II bahwa investasi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan PDRB. Berdasarkan

teori – teori tersebut dan berdasarkan hasil pengujian serta data konkret yang ada maka interpretasi atas variabel investasi swasta yang berada di Jawa Tengah bukanlah tidak signifikan. Investasi swasta di Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah (sesuai hasil pengujian statistik parameter individual atau uji t dan berdasarkan beberapa teori pertumbuhan ekonomi), namun jika nilai investasi swasta yang ada di Provinsi Jawa Tengah kurang dari nilai signifikansi 10%, dimana nilai investasi swasta adalah 0,8017, maka kenaikan sebesar 1% investasi swasta di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,003% atau kenaikan PDRB Provinsi Jawa Tengah akan meningkat dari 0,003%. Hal ini karena tanda negative pada koefisien variabel investasi swasta di Jawa Tengah menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Dan pada teori Harrod – Domar, ICOR (investasi) berbanding terbalik dengan growth (pertumbuhan ekonomi).

Dengan demikian, untuk lebih meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Tengah, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan program – program yang dapat menarik investor swasta, baik melalui saving ataupun investasi lainnya untuk berinvestasi di Jawa Tengah.

- 7) Koefisien variabel harga komoditi di Provinsi Jawa Tengah (IHK_{je}) adalah sebesar 0,000282 dan bertanda positif. Berdasarkan perhitungan statistik parameter individual (Uji t), variabel harga komoditi di Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Artinya, variabel komoditi di Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, meskipun kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan untuk variabel harga komoditi adalah data rata – rata IHK empat kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Tegal, Kota Purwokerto, Kota Surakarta dan Kota Semarang. Keempat kota tersebut merupakan sebagian kecil dari 36 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, sehingga rata – rata IHK di empat kota tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian yang menjadi acuan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suparta. Di dalam penelitian I Wayan Suparta, variabel harga komoditi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Sedangkan pada penelitian ini, variabel harga komoditi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan hasil antara penelitian ini dan penelitian I Wayan Suparta terjadi karena data yang digunakan untuk variabel harga komoditi berbeda. Data yang digunakan untuk variabel harga komoditi di dalam penelitian I Wayan Suparta adalah data IHK Provinsi Lampung, sedangkan data yang digunakan untuk variabel harga komoditi di dalam penelitian ini adalah data rata – rata IHK empat kota di Provinsi Jawa Tengah yang mewakili IHK Provinsi Jawa Tengah. IHK Provinsi Lampung memang dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Lampung, karena cakupannya sama – sama ditingkat provinsi. Sedangkan rata – rata IHK empat kota di Provinsi Jawa Tengah adalah cakupan tingkat kota/kabupaten, namun dijadikan data untuk menggambarkan IHK setingkat provinsi, sehingga hasilnya IHK Kota Semarang tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor internal dan eksternal PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 sampai dengan 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PDRB Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh pengaruh faktor eksternal. Meskipun demikian, faktor internal juga harus diperhatikan dalam mencapai peningkatan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Tengah, pemerintah perlu memperhatikan faktor internal dan juga faktor eksternal.
2. Variabel investasi merupakan faktor internal PDRB Provinsi Jawa Tengah, namun investasi juga dapat menjadi faktor eksternal PDRB Provinsi Jawa Tengah melalui keterkaitan kegiatan ekonomi dengan daerah – daerah terdekat yang memiliki sifat komplementer, seperti Provinsi Jawa Timur. Hal ini diperlukan karena antara PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang searah dan pengaruh yang signifikan. Ketika PDRB Provinsi Jawa Timur meningkat, maka PDRB Provinsi Jawa Tengah juga akan meningkat. Meningkatnya PDRB Provinsi Jawa Tengah akibat dari meningkatnya PDRB Provinsi Jawa

Timur yang disebabkan oleh keterkaitan kegiatan ekonomi berupa interaksi perdagangan atau investasi.

3. Selain melihat faktor eksternal daerah yang memiliki sifat komplementer dengan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebaiknya juga melihat faktor ancaman dari daerah lain yang memiliki hubungan yang tidak searah atau berbanding terbalik terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, yaitu Provinsi Jawa Barat. PDRB Provinsi Jawa Tengah akan menurun jika PDRB Provinsi Jawa Barat meningkat. Hal ini disebabkan karena Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat memiliki struktur ekonomi yang sama, sehingga sifat kedua daerah tersebut adalah persaingan. Dengan kondisi demikian, sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus pada potensi ekonomi yang benar – benar dapat dijadikan unggulan, sehingga dapat dibedakan dengan Provinsi Jawa Barat. Potensi unggulan tersebut dapat membuat permintaan dan penawaran yang berbeda dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh Provinsi Jawa Barat, sehingga ada perbedaan produk yang dapat saling melengkapi guna menciptakan keberlangsungan ekonomi antar daerah.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus lebih memperhatikan keseimbangan belanja daerah dalam mencapai tujuan meningkatkan PDRB. Pengeluaran Rutin harus tetap seimbang dengan pengeluaran pembangunan. Hal ini karena pengeluaran rutin menunjang pengeluaran pembangunan, sedangkan pengeluaran pembangunan membentuk PDRB. Ketika pengeluaran rutin jauh lebih besar daripada pengeluaran pembangunan, maka beban pemerintah semakin besar tanpa adanya pembangunan di sektor riil. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran rutin akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan justru menurunkan PDRB. Berbeda dengan peningkatan pengeluaran pembangunan, peningkatan pembangunan akan membentuk modal dalam peningkatan PDRB Provinsi Jawa Tengah.
5. Melalui potensi keunggulan ekonomi, tingkat harga komoditi di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Tengah.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Nasional. 1995. *Statistika Indonesia 1995*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1998. *Statistika Indonesia 1998*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2000. *Statistika Indonesia 2000*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2002. *Statistika Indonesia 2002*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2004. *Statistika Indonesia 2004*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2007. *Statistika Indonesia 2007*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2008. *Statistika Indonesia 2008*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2010. *Statistika Indonesia 2010*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2012. *Statistika Indonesia 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 1994. *Jawa Tengah Dalam Angka 1994*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 1995. *Jawa Tengah Dalam Angka 1995*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 1998. *Jawa Tengah Dalam Angka 1998*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2000. *Jawa Tengah Dalam Angka 2000*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2002. *Jawa Tengah Dalam Angka 2002*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2004. *Jawa Tengah Dalam Angka 2004*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2007. *Jawa Tengah Dalam Angka 2007*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2008. *Jawa Tengah Dalam Angka 2008*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2010. *Jawa Tengah Dalam Angka 2010*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2011. *Jawa Tengah Dalam Angka 2011*. Semarang: BPS.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2012. *Jawa Tengah Dalam Angka 2012*. Semarang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1997. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 – 1997*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1998. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1995 – 1998*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1999. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1996 – 1999*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2002. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 – 2002*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2003. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 – 2003*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2005. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001 – 2005*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2006. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2006*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2008*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1997. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi – Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994 – 1997*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1995/1996 – 1998/1999. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1996/1997 – 1999/2000. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1997/1998 – 2000. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 1999/2000 – 2002. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2000 – 2003. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2002 - 2005. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2003 - 2006. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2005 – 2008. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2006 – 2009. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2008 – 2011. *Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I*. Jakarta: BPS.
- Baldacci, Emanuele, Salvatore Dell’Erba and Tigran Poghosyan. 2011. Spatial Spillovers in Emerging Market Spreads. *International Monetary Fund*, WP/11/221.
- Bank Indonesia. 2005. *Statistika Ekonomi Keuangan Daerah – Jawa Tengah 2005 Vol. 12*. Semarang: BI
- Bank Indonesia. 2006. *Statistika Ekonomi Keuangan Daerah – Jawa Tengah 2006 Vol. 12*. . Semarang: BI
- Bank Indonesia. 2007. *Statistika Ekonomi Keuangan Daerah – Jawa Tengah. 2007 Vol. 12*. Semarang: BI
- Bank Indonesia. 2008. *Statistika Ekonomi Keuangan Daerah – Jawa Tengah. 2008 Vol. 12*. Semarang: BI
- Bank Indonesia. 2009. *Statistika Ekonomi Keuangan Daerah – Jawa Tengah. 2009 Vol. 12*. Semarang: BI
- Bank Indonesia. 2010. *Statistika Ekonomi Keuangan Daerah – Jawa Tengah. 2010 Vol. 12*. Semarang: BI
- Bank Indonesia. 2011. *Statistika Ekonomi Keuangan Daerah – Jawa Tengah. 2011 Vol. 12*. Semarang: BI

- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics 3th Edition*, International Edition. Singapore: McGraw Hill.
- Kuncoro Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro Mudrajat. 2001. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lee, Hyun Hoon, Hyeon Seung Huh dan David Haris. 2003. The Relative Impact of The US and Japanese Business Cycles on The Australian Economy. *Japan and the World Economy*, Vol. 15, h. 111 – 129.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Meier, G.M. 1989. *Leading Issues in Economic Development*. 5th Edition. New York: Oxford University.
- Mugova, Terrence Tafadzwa. 2009. “Interdependence and Business Cycle Transmission Between South Africa and The USA, UK, Japan and Germany.” *Thesis*, Department of Economics and Economic and Economic History, Rhodes University.
- Sibero, A. 1985. *Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah*. Prisma No. 12. Desember.
- Sukirno, Sadono. 1999. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparta, I Wayan. 2009. Spillover Effect Perekonomian Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1, h. 32-48.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.